

PEMBACAAN ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Arus Radikalisasi dan Pengarusutamaan Multikulturalisme dalam Pendidikan¹

Oleh:

Syamsul Arifin²

Iftitah

Melakukan pembacaan secara sosiologis terhadap Islam di Indonesia akan menemukan beberapa aspek yang menarik. Yang paling mudah terbaca tentu populasi umat Islam yang bahkan menempatkan Indonesia pada posisi puncak sebagai negara dengan jumlah umat paling banyak di seluruh dunia kendati secara geografis Indonesia selalu disebut sebagai “Islam pinggiran”. Pada 2011, The Pew Research Center’s Religion & Public Life Project memublikasikan, *The Future of the Global Muslim Population: Projection for 2010-20130*. Menurut publikasi ini, dari 10 negara yang berpenduduk mayoritas Islam (Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Iran, Turki, Aljazair, Maroko), Indonesia, menempati ranking teratas setidaknya sampai pada 2029. Selain soal jumlah, aspek lainnya yang tidak kalah menariknya dibaca adalah keragaman umat Islam. Dengan jumlah yang demikian besar tersebut, ditambah lagi dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), umat Islam di Indonesia di samping memiliki kesatuan identitas, tetapi pada bagian lainnya dijumpai banyak perbedaan dan keragaman.

Keragaman masyarakat Islam di Indonesia kian menarik didalami bila ditempatkan dalam konteks perubahan Indonesia kontemporer. Indonesia kontemporer ditandai dengan pusparagam perubahan yang ternyata berimplikasi secara mendasar terhadap kehidupan keagamaan termasuk yang terjadi pada masyarakat Islam. Salah satu indikator bahwa Islam Indonesia kontemporer sedang dilanda perubahan dan sekaligus keragaman adalah menyeruaknya perbincangan di sekitar radikalisasi dan deradikalisasi. Transisi selepas kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998 rupanya memberikan peluang munculnya berbagai kelompok keagamaan yang berhaluan keras (*hardliners*) seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang juga disebut sebagai gerakan Islam transnasional (GIT) karena memiliki jejaring yang melintasi batas-batas negara. HTI hanyalah salah satu contoh kelompok keagamaan yang berkembang pesat setelah rezim Orde Baru jatuh. Di luar HTI terdapat kelompok keagamaan berbasis lokal (*home grown*) yang memiliki daya tarik sehingga beberapa kalangan bergabung seperti Front Pembela Islam (FPI) yang tetap eksis hingga sekarang.

Di luar kelompok keagamaan garis keras, baik yang berkembang secara lokal (*home grown*) maupun yang merupakan bagian dari jejaring Islam transnasional seperti HTI, pembacaan terhadap Islam Indonesia di era kontemporer perlu juga ditujukan pada kelompok keagamaan garis keras yang menebar aksi teror di berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan kelompok ini dapat dikatakan sebagai bentuk perkembangan yang paling ekstrim, sekaligus menakutkan dari kelompok keagamaan radikal karena mengakibatkan korban nyawa dari kalangan sipil, kerusakan terhadap berbagai bangunan (tempat ibadah, kafe, restoran, mal), dan kerugian secara material. Sebagai bagian dari Islam di kawasan Asia Tenggara, Islam di Indonesia sebenarnya merupakan Islam yang toleran, modern, dan pluralistik. Pergeseran tampilan Islam ke arah yang militan, keras, bahkan tidak jarang diselingi dengan aksi teror, menimbulkan keheranan dari sejumlah peneliti terutama dari pihak luar (*outsider*) Indonesia yang terkadang dalam kajian Islam disebut dengan *Islamicist*.

¹ Pengantar Dialog dalam Kuliah Tamu pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Jumat 29 Mei 2014. Kajian lebih mendalam terhadap topik yang di bahas dalam kuliah tamu ini dapat dibaca dalam buku saya yang berjudul, **Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme Indonesia** (2015)

² Syamsul Arifin (lahir di Sampang, 22 Desember 1967) adalah guru besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang; Wakil Direktur bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Ketua Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Deradikalisasi dan Multikulturalisme

Lalu pertanyaannya: Apakah arus radikalisme Islam dapat dibendung? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena Islam radikal memiliki watak keabadian. Sampai saat ini, Indonesia belum bisa steril dari Islam radikal dan ancaman terorisme. ISIS merupakan contoh yang paling mutakhir. Kendati berpusat di Irak dan Syria, ternyata pengaruhnya sampai ke Indonesia. Dengan mempertimbangkan watak keabadian tersebut, maka untuk mengatasinya dibutuhkan pendekatan secara menyeluruh, sistemik, semesta, dalam pengertian melibatkan berbagai institusi. Buku ini hendak menawarkan pendidikan sebagai salah satu institusi yang dapat dioptimalkan untuk melakukan apa yang disebut dengan deradikalisasi. Peran pendidikan terutama yang dikelola oleh umat Islam diharapkan dapat melakukan peran tersebut bersama institusi lainnya sehingga wajah Islam di Indonesia tetap terlihat ramah, toleran, moderat, namun tetap memiliki martabat di mata dunia. Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh institusi pendidikan dalam rangka deradikalisasi adalah dengan mengembangkan suatu model pendidikan yang dapat mencegah terjadinya infiltrasi paham radikal. Model ini perlu mengacu pada suatu desain utuh yang memuat: kerangka pandang yang mendasar (*philosophical foundation*) terhadap Islam; materi; model pembelajaran; serta lingkungan yang dapat menumbuhkan pengetahuan dan sikap pengakuan, toleran, dan kooperatif terhadap pihak yang berbeda baik karena alasan agama, paham keagamaan, budaya, dan lain sebagainya. Bila dibuat suatu konseptualisasi, maka model pendidikan ini dapat disebut dengan model pendidikan multikultural. Dengan demikian dapat dipertegas di sini, model pendidikan yang perlu dikembangkan dalam rangka deradikalisasi adalah model pendidikan multikultural. Pada level diskursus dan praksis akademik, konsep multikultural dan multikulturalisme mendapatkan respons secara positif dan konstruktif terutama dari kalangan akademisi dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Indikator keberterimaan terhadap multikulturalisme bisa dicermati pada berbagai aktivitas akademik seperti seminar, lokakarya, penelitian, dan publikasi untuk mengeksplorasi dan mengelaborasinya sebagai karakter suatu kebijakan dan model aktivitas tertentu di antaranya dalam dunia pendidikan. Ada banyak contoh hasil eksplorasi dan elaborasi di bidang ini. Pada 2009 Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta menerbitkan buku *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*. Buku ini merupakan buah karya tulis guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dari beberapa daerah di Indonesia. Salah satu penulis pada buku tersebut bahkan berupaya mengintegrasikan PAI dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berwawasan multikultural: “*Mengintegrasikan PAI dan PKn dalam mengupayakan terwujudnya PAI yang berwawasan multikultural selayaknyalah sebuah terobosan yang seharusnya ditempuh. Apabila upaya ini terwujud, tentu saja akan banyak merubah wajah PAI yang lebih inklusif dan toleran.*”³ Institusi pendidikan yang berbentuk pesantren juga telah berupaya mengembangkan suatu kurikulum yang dilandasi oleh nilai-nilai multikultural seperti ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Abdullah Aly.⁴ Pada 2009 LP3ES menerbitkan buku, *Budaya Damai: Komunitas Pesantren*, yang mengangkat kajian terhadap sepuluh pesantren di lima provinsi.⁵ Meskipun tidak menyebut multikulturalisme secara eksplisit, publikasi Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Islam Rahman Lil ‘Alamin*, perlu disebut pada bagian ini karena mengandung afirmasi terhadap pengakuan dan penghargaan Islam terhadap berbagai manifestasi keragaman yang meliputi keragaman: individu, negara, suku bangsa, bahasa, dan agama, suatu sikap yang memperoleh penekanan dalam multikulturalisme.⁶ Pendidikan yang dilandasi oleh multikulturalisme atau singkatnya disebut dengan pendidikan multikultural, menurut Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn merupakan desain pendidikan yang

³ Agus Iswanto, “Integrasi PAI dan PKn: Mengupayakan PAI yang Berwawasan Multikultural,” dalam Zainal Abidin dan Neneng Habibah (ed.), *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme* (Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta, 2009), hal. 21.

⁴ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

⁵ Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai: Komunitas Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2009).

⁶ Buku *Islam Rahmatan Lil ‘Alamin* yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia terdiri dari tiga jilid yang dimaksudkan sebagai buku rujukan guru PAI di tiga jenjang pendidikan: Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.

bermaksud untuk mendukung dan memperluas konsep budaya, keragaman, kesetaraan, dan demokrasi di dalam konteks sekolah,⁷ untuk menyiapkan warga yang dapat hidup bersama (*to live together*) dalam harmoni di tengah-tengah perbedaan.⁸ Buku yang diterbitkan oleh salah satu direktorat dalam Kementerian Agama tersebut sejalan dengan prinsip dalam pendidikan multikultural seperti dikemukakan Donna M. Gollnick, Philip C. Chinn, dan Hilda Herdandez.

Mengintegrasikan pendidikan dengan multikulturalisme dalam konteks pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam, tentu meniscayakan suatu justifikasi teologis yang dapat menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memuat nilai-nilai dan sekaligus mendukung pembentukan sikap yang ditekankan oleh multikulturalisme. Hal inilah yang dimaksud dengan kerangka pandang secara mendasar (*philosophical foundation*) terhadap Islam yang akan menjadi acuan bagi pendidikan multikultural. Sebagaimana kajian yang dilakukan Donna M. Gollnick, Philip C. Chinn, dan Hilda Herdandez, pada multikulturalisme ditekankan pengakuan terhadap berbagai manifestasi keragaman yang diperlihatkan oleh berbagai kelompok. Sementara sikap yang diperlihatkan oleh organisasi Islam radikal berbanding terbalik dengan multikulturalisme. Pertanyaannya, apakah Islam menyediakan suatu landasan teologis bagi multikulturalisme? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat tergantung pada cara pembacaan terhadap Islam. Cara pembacaan yang dapat mengembangkan suatu kerangka pandang Islam yang terbuka dengan nilai-nilai dasar dalam multikultural di antaranya dilakukan Nasaruddin Umar seperti dapat dibaca pada buku *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an & Hadis* sebagaimana telah disinggung di bagian pendahuluan tulisan ini. Nasaruddin Umar menyebut pembacaannya sebagai pembacaan moderat dan toleran sebagai dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap pembacaan secara radikal. Pembacaan secara moderat dan toleran akan menghasilkan suatu kerangka pandang Islam yang *rahmatan lil alamin*, toleran, menghormati hak asasi manusia, dan emansipatoris. Kerangka pandang ini akan menstimulasi berkembangnya sikap positif terhadap perbedaan yang terdapat pada kehidupan manusia. Nasaruddin Umar menegaskan sebagai berikut:

“...Islam...menyikapi perbedaan yang terdapat pada komunitas manusia sebagai sesuatu yang alamiah yang harus dihormati dan meletakkannya pada kerangka untuk mengembangkan solidaritas dan kerja sama yang kukuh antar manusia. Jadi paparan ini memberikan suatu konklusi bahwa Islam sangat menekankan pada penciptaan dan penyebaran semangat egalitarianisme dan memahami pluralisme sebagai sebuah sunnatullah. Pada saat yang sama, Islam menentang eksklusivisme; homogenitas dan semacamnya, karena hal ini bertentangan secara diametral dengan semangat egalitarianisme.”⁹

Pada bagian lain, Nasaruddin Umar menegaskan kembali keterbukaan Islam:

“Sebagai sebuah agama samawi yang terakhir, Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang rahmatan lil alamin. Visi ini terefleksi dalam keseluruhan teks-teks ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah teologi, syariat, maupun tasawuf atau etika. Konsepsi rahmatan lil alamin ini secara tidak langsung menekankan peran Islam pada pemenuhan hak-hak dasar manusia (*huquq al-insani*). Hak-hak dasar manusia (*huquq al-insani*) tercakup dalam lima prinsip dasar, yang dikenal dengan ad-dharuriyat al-khams atau disebut juga *maqashid as-syariah*: yakni *hifdzun ad-din* (perlindungan agama), *hifdzun an-nafs* (perlindungan diri), *hifdzun al-aql* (perlindungan akal), *hifdzun an-nasl* (perlindungan keluarga), *hifdzun al-mal* (perlindungan harta).”¹⁰

⁷ Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society* (Upper Saddle River; Merrill Prentice Hall: 2002), hal. 5.

⁸ Hilda Herdandez, *Multicultural Education: A Teacher's Guide to Linking Context, Process, and Content* (Upper Saddle River; Merrill Prentice Hall: 2001), hal. 7.

⁹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an & Hadis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014). hal. 353.

¹⁰ *Ibid.*, 379.

Cara pandang moderat dan toleran terhadap Islam sebagaimana dikembangkan Nasaruddin Umar selanjutnya akan menjadi acuan dalam mendesain materi pembelajaran. Dalam rangka deradikalisasi, materi pembelajaran sebagai turunan dari cara pandang terhadap Islam perlu difokuskan pada doktrin-doktrin yang dikonstruks melalui pembacaan secara radikal. Mengutip kembali Nasaruddin Umar, doktrin-doktrin yang perlu didekonstruksi dan direkonstruksi meliputi: *jihad, qital, murtad, ablul kitab, kafir dzimmi, kafir harbi, darussalam, dan darulbarbi*.¹¹ Dalam kerangka pandang Islam radikal, doktrin-doktrin tersebut telah memicu ketegangan, konflik, dan kekerasan dengan pihak lain yang tidak sepaham dan menentang pemahaman organisasi Islam radikal. Dekonstruksi dan rekonstruksi tidak dimaksudkan menegasikan doktrin-doktrin tersebut dari Islam, tetapi sebagaimana dikemukakan Yusuf Qardhawi dalam buku, *Fiqih Jihad*, dimaksudkan untuk menghadirkan suatu pemahaman yang dapat menengahi antara pemahaman yang terlalu berlebihan (*al-ghuluw/al-ifrath*) dan ingin mengurangi (*al-jafa'/al-tafrith*) yang keduanya dapat merugikan citra Islam.¹² Karena buku Yusuf Qardhawi tersebut memfokuskan pada doktrin jihad, maka sasaran pengembangan pemahaman moderat, tentu saja jihad. Bagi pihak yang terlalu berlebihan, seperti diperlihatkan oleh organisasi Islam radikal, jihad melalui dipahami sebagai peperangan melawan orang kafir. Bagi mereka, semua orang kafir adalah sama. Apabila umat Islam memiliki kemampuan, seluruh orang kafir wajib diperangi. Bagi mereka, jelas Yusuf Qardhawi lebih lanjut:

“Masih menurut mereka, semua ayat al-Qur’an dan teks hadis yang mengajak menyerukan damai terhadap orang-orang yang berdamai dengan umat Islam atau memberikan kebaikan dan keadilan kepada pihak-pihak yang tidak memerangi Islam serta tidak mengusir umat Islam dari negerinya sendiri adalah ayat dan hadis temporal yang telah berakhir masa ketetapanannya. Ayat-ayat tersebut memang termuat di dalam mushaf dalam bentuk tulisan, tetapi ketentuannya sudah tidak berlaku. Seluruh ayat tersebut—yang berjumlah sekitar 140 atau 200 lebih—telah dihapus oleh satu ayat yang mereka sebut sebagai Ayat Pedang (*Ayat Al-Saij*).”¹³

Terhadap kelompok yang ingin mengurangi jihad, Yusuf Qardhawi juga menyampaikan kritik karena pemahaman mereka justru melemahkan umat Islam di satu pihak, sementara di pihak lain, akan memudahkan pihak luar yang memiliki agenda ingin melemahkan Islam melalui penjejahan atau cara-cara lainnya. Menurut Yusuf Qardhawi, doktrin jihad tidak bisa dikurangi, apalagi dihapus. Yang perlu dilakukan oleh umat Islam pada saat ini adalah memaknai kembali jihad sesuai dengan spirit modernitas. Yusuf Qardhawi mencontohkan dakwah Islam sebagai manifestasi jihad. Menurut Yusuf Qardhawi, dakwah pada saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berkembang demikian canggih. Hal ini berbeda dengan cara dakwah pada zaman dahulu yang masih tradisional dimana dakwah dilakukan secara langsung kepada sasaran dakwah. Pada zaman sekarang, dakwah umat Islam harus mengoptimalkan fasilitas yang disediakan internet. Dengan demikian, tegas Yusuf Qardhawi, dakwah tidak lagi bisa dilakukan dengan cara berperang.¹⁴

Setelah dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap doktrin-doktrin tertentu melalui pembacaan secara moderat dan toleran sebagaimana dikemukakan di atas, tahapan berikutnya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menanamkan doktrin-doktrin tersebut melalui kegiatan pembelajaran. Tetapi sebelum menjelaskan tahapan ini, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa dengan dekonstruksi dan rekonstruksi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman baru terhadap doktrin-doktrin tersebut yang pada tahap berikutnya diharapkan muncul suatu sikap yang lebih terbuka dengan pihak lain tanpa perlu khawatir terhadap penggerusan identitas dirinya. Karena tidak hanya mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga sikap (*attitude*), maka pemahaman terhadap doktrin-doktrin perlu mempertimbangkan model pembelajaran dalam bingkai pendidikan karakter. Pendidikan karakter ingin mengembangkan tiga aspek pada diri manusia secara simultan yang meliputi aspek pengetahuan moral yang baik

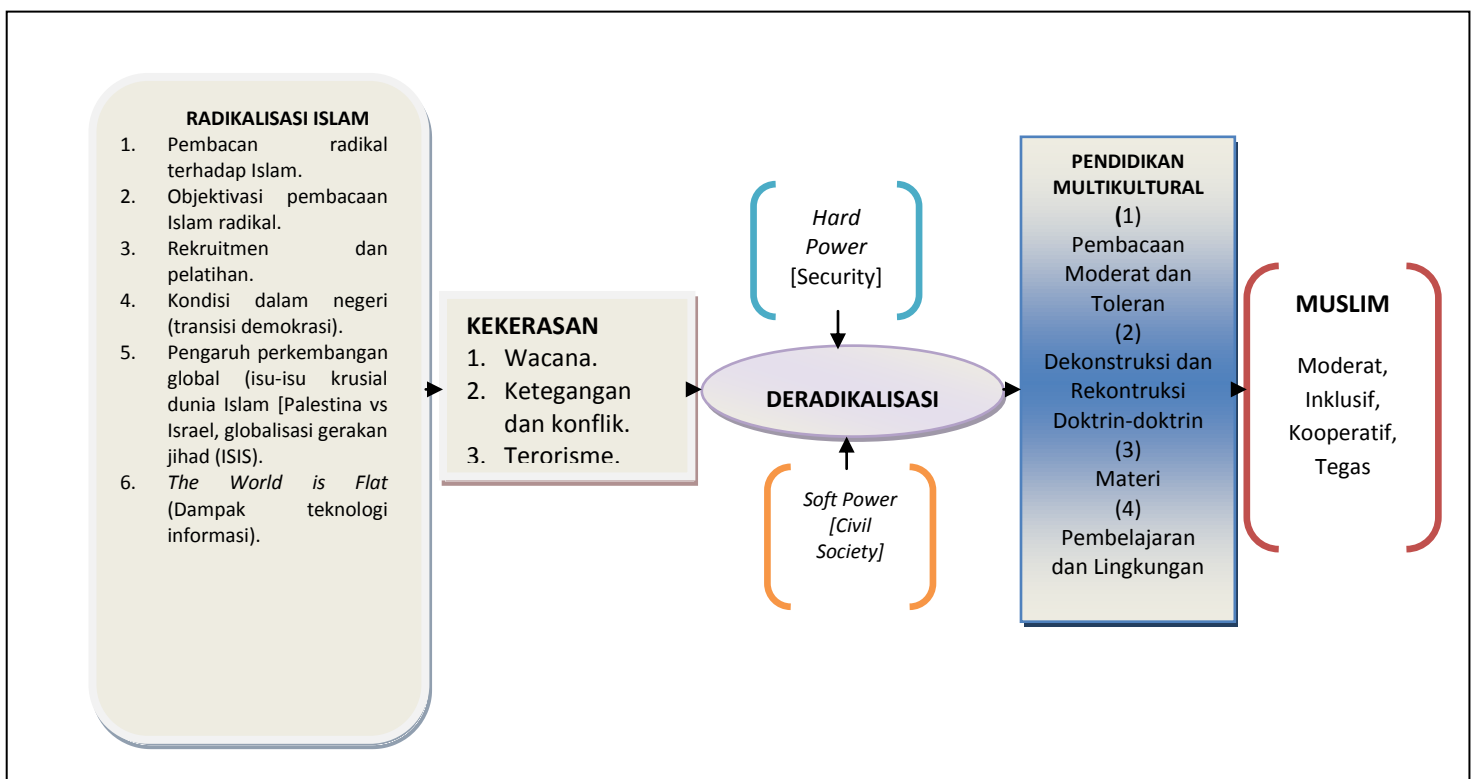
¹¹ Ibid., 83-274.

¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad* (Bandung: Mizan, 2010), xlvii.

¹³ Ibid., xlvii.

¹⁴ Ibid., l.

(*moral knowing*), perasaan yang baik (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*).¹⁵Pada tahap implementasi di ranah pembelajaran, pemahaman doktrin-doktrin melalui pendidikan karakter, meniscayakan: (1) keberadaan pengajar dan pendidik yang menguasai berbagai metode pembelajaran terutama yang dapat menarik keterlibatan siswa/mahasiswa secara aktif serta mampu memberikan penjelasan secara persuasif, bukan doktrinatif; (2) lingkungan pendidikan yang kondusif terhadap pembentukan sikap pengakuan, terbuka, toleran, dan kooperatif terhadap pihak lain; (3) ketersediaan materi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, mudah diakses, serta mudah dipahami. Dengan implementasi secara utuh tersebut, keluarannya (*out put*) diharapkan memiliki karakter moderat, inklusif, dan kooperatif, namun tetap tegas (*firm*) dengan pihak lain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Model deradikalisasi melalui pendidikan multikultural selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah.



Penutup

“Imagine, if you will, a world without Islam. Nearly impossible, it would see, when images and references to Islam dominate our headline, airwave, computer screens, and political debates. We are inundated with terms such as jihad, fatwa, madrasa, Taliban, Wahhabi, mullah, martyr, mujahideen, Islamic radicals, and Shari’a law. Islam would seem to lie at the very center of the American struggle against terrorism and the long commitment to several overseas wars launched with the “Global War on Terror.”¹⁶

Tulisan ini menyoroiti fenomena keagamaan dalam masyarakat Islam di Indonesia yang mengalami perubahan secara signifikan sejak jatuhnya rezimnya Orde Baru pada 1988. Salah satu perubahan yang cukup signifikan dan menyita perhatian banyak kalangan adalah maraknya berbagai kelompok keagamaan yang mengusung ideologi radikal. Keberadaan kelompok atau organisasi Islam radikal ini tidak pernah statis, tetapi terus mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika di dalam negeri dan luar negeri. Perkembangan ini mengundang kekhawatiran dan kecemasan publik karena tidak jarang organisasi Islam radikal

¹⁵ Pusat Kurikulum dan Perbukuan, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), hal. 6.

¹⁶ Graham E. Fuller, *A World Without Islam* (New York: Back Bay Books, 2010), hal. 3.

menebar aksi teror yang berakibat fatal, baik kepada kalangan sipil yang menjadi sasaran aksi mereka, maupun yang dialami oleh pelakunya sendiri.

Apakah perkembangan organisasi Islam radikal dapat dibendung? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena Islam radikal memiliki watak keabadian. Sampai saat ini, Indonesia belum bisa steril dari Islam radikal dan ancaman terorisme. ISIS merupakan contoh yang paling mutakhir. Kendati berpusat di Irak dan Syria, ternyata pengaruhnya sampai ke Indonesia. Dengan mempertimbangkan watak keabadian tersebut, maka untuk mengatasinya dibutuhkan pendekatan secara menyeluruh, sistemik, semesta, dalam pengertian melibatkan berbagai institusi. Untuk mengatasi dampak gerakan kelompok Islam radikal, aparat keamanan tidak bisa bertindak sendirian, kata Hasyim Muzadi.¹⁷ Mengambil contoh terorisme, Hasyim Muzadi memandang penting keterlibatan masyarakat sipil.¹⁸ Sebab tanpa keterlibatan masyarakat sipil, jelas Hasyim Muzadi lebih lanjut, akar terorisme tidak bisa dibasmi sampai ke akar-akarnya.¹⁹

Tulisan ini telah menawarkan pendidikan sebagai salah satu institusi yang dapat dioptimalkan untuk melakukan apa yang disebut dengan deradikalisasi. Peran pendidikan terutama yang dikelola oleh umat Islam diharapkan dapat melakukan peran tersebut bersama institusi lainnya sehingga wajah Islam di Indonesia tetap terlihat ramah, toleran, moderat, namun tetap memiliki martabat di mata dunia. Untuk memperkuat peran tersebut, tulisan ini merekomendasikan multikulturalisme. Dengan mengenyampingkan perdebatan di sekitar definisi dan perspektif kajian pada multikulturalisme, tulisan ini lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada multikulturalisme yang meliputi: pengakuan, keterbukaan, toleransi, dan kesediaan bekerja sama berdasarkan prinsip kemanusiaan universal. Implementasi multikulturalisme dalam pendidikan yang dimaksudkan sebagai strategi deradikalisasi meniscayakan ketersediaan setidaknya tiga hal. Pertama, cara pembacaan yang moderat dan toleran terhadap Islam. Kedua, materi pendidikan yang memuat hasil hasil pembacaan ulang terhadap doktrin-doktrin dalam Islam yang selama ini disalahpahami oleh organisasi Islam radikal seperti *jihad*, *qital*, *murtad*, *ablul kitab*, *kafir dzimmi*, *kafir harbi*, *darussalam*, dan *darulbarbi*. Ketiga, model pembelajaran aktif, interaktif, dan persuasif untuk menanamkan hasil pembacaan ulang terhadap doktrin-doktrin tersebut.

¹⁷Hasyim Muzadi, "Terorisme adalah Musuh Islam," dalam Muhammad Tahir-ul-Qadri, *Fatwa tentang Terorisme dan Bunuh Diri* (Jakarta: LPPi dan Minhaj-ul-Qur'an International), hal. 16.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,